

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara Indonesia terhadap hutang luar negeri dimana pemanfaatan pajak mencerminkan kondisi negara tersebut karena pajak memberi sumbangan terbesar untuk pendapatan negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik secara rutin maupun untuk pembangunan negara. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan. Karena jika tidak mengikuti aturan tersebut bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan, baik bagi pemerintah maupun bagi Wajib Pajak itu sendiri.

Sistem self assessment menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi Wajib Pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem self assessment yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Penelitian ini membahas “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tenaga Honorer Kantor Manajemen Universitas Airlangga dalam Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) 21”. Berdasarkan hasil uji secara serentak maka kedua variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak tenaga honorer Kantor Manajemen Universitas Airlangga.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak dan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak tenaga honorer Kantor Manajemen Universitas Airlangga sehingga akan meningkatkan kesadaran perpajakan. Kantor Manajemen Universitas Airlangga diharapkan melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan informasi tentang kewajiban perpajakan Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya yang terkait dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan seminar peraturan perpajakan yang masih berlaku yang diberikan secara gratis dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Manajemen Universitas Airlangga.

Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

ABSTRAK

Taxes are one source of state revenue that is expected to reduce the country's dependence on foreign debts Indonesia where tax utilization reflects the condition of the country due to taxes contributed most to the revenue the state of Indonesia used to finance government spending, either regularly or for the development of the country. This can be done well if Taxpayer understand tax laws and follow the rules that apply in accordance with the tax laws. Because if you do not follow these rules could occur mistakes could be costly, both for the government and for taxpayers themselves.

Self-assessment system requires people's active participation in the fulfillment of tax obligations. Taxpayers who already have a TIN is expected to be a taxpayer who is active in meeting their tax obligations. In accordance with the self-assessment system adopted in Indonesia, Taxpayers entrusted to compute, calculate, pay, and self-reported the amount of tax to be paid. The tax obligations must be conducted in accordance with the laws and regulations applicable tax. Therefore, the taxpayer must have a good understanding of existing tax regulations in order to meet the tax obligations.

This study discusses "Understanding the Effects of Ownership Tax Act and Tax Identification Number (TIN) of the Taxpayer Compliance Personnel Management Office Honorary Airlangga University in Withholding Tax (Income Tax) 21". Based on the test results simultaneously, the two independent variables, understanding tax laws, possession of a Taxpayer Identification Number (TIN) jointly able to explain the change in the dependent variable is honorary Taxpayer Compliance Management Office Airlangga University.

It can be concluded that the understanding of the tax rules and ownership Taxpayer Identification Number (TIN) positive effect on tax compliance honorary Airlangga University Management Office that will increase awareness of taxation. Office of Management Universitas Airlangga expected in cooperation with the Directorate General of Taxation to provide information about the tax obligations of tax to the individual taxpayer, particularly related to withholding tax (VAT) of Article 21 to conduct socialization activities and seminars taxation rules still apply given away for free and continuous to the individual taxpayer in the Office of Management, University of Airlangga.

Keywords: Understanding Tax Regulation, Compliance Taxpayer, Income Tax (VAT) Section 21.